

BAB V

KESIMPULAN

Dewasa ini Jepang melihat dirinya berada dalam suatu keadaan dimana keamanan dan kemakmurannya benar-benar sedang dipertaruhkan. Sebagai negara industri maju namun miskin bahan baku dan energi serta tergantung pada ekspor hasil industrinya ke luar negeri, Jepang perlu keamanan bagi jalur komunikasinya. Padahal seiring dengan meredanya perang dingin disepanjang jalur komunikasinya itu merupakan wilayah yang sangat rawan. Beberapa faktor kestabilan masih nampak ada seperti peningkatan kekuatan militer Rusia di Timur Jauh, peningkatan kekuatan maritim Cina akibat disahkannya kebijaksanaan teritorial laut yang baru, kesenjangan di Semenanjung Korea dan kawasan Indocina. Di lain pihak Amerika yang selama ini dijadikan sandaran bagi keamanan Jepang mulai menarik diri secara perlahan dari kawasan ini. Penarikan mundur kekuatan militer Amerika Serikat dari kawasan Asia Pasifik ini dikhawatirkan akan menyebabkan *vacuum of power*. Akibatnya akan muncul perlombaan senjata (*Arms race*) seperti terlihat dari penumpukan sejumlah persenjataan dan peningkatan anggaran militer di negara-negara di kawasan Asia Pasifik ini.

Oleh sebab itu kawasan Asia Pasifik perlu menata kembali aturan keamanan regionalnya. Jepang sebagai salah satu negara di kawasan ini harus mengadakan penyesuaian besar-besaran dalam politik keamanannya

pembatasan-pembatasan seperti artikel 9 UUD 1947, kontrol sipil, tiga prinsip non nuklir dan batas atas 1 % dari GNP maka dalam pengembangannya dilakukan setengah-setengah, meskipun dalam pelaksanaannya beberapa pembatasan di atas telah dilanggar sehingga Jepang saat ini telah menjadi negara dengan kemampuan militer terkuat di kawasannya.

Pengembangan politik keamanan Jepang mengalami perubahan drastis pada masa pemerintahan PM. Yasuhiro Nakasome. Dalam meningkatkan kemampuan pertahanan, JDA menetapkan beberapa kebijaksanaan antara lain: *Defence Capability Build up Plans* 1958-1976, NDPO 1976-1970, MTDPE 1980-1984 dan 1983-1987, Program Pertahanan Jangka Menengah 1986-1990 dan Program Pertahanan Jangka Menengah Baru 1991-1995. Berakhirnya perang dingin telah mengubah pola ancaman terhadap Jepang. Bila pada masa perang dingin kekhawatiran Jepang berupa ancaman ideologi sebagai manifestasi dari pertentangan Timur-Barat maka ancaman yang dihadapi Jepang saat ini adalah ancaman militer murni. Uni Soviet dan RRC tidak lagi ditakuti karena ideologinya yang ekspansif tetapi karena perkembangan militernya yang semakin kuat di kawasan ini. Jadi meningkatnya kekuatan militer negara-negara kawasan Asia Pasifik ini, telah membuat nyata dan konkret persepsi Jepang mengenai ancaman luarnya yang selama ini hanya bersifat hipotetis, satu kenyataan lain adalah Jepang harus menghadapi tantangan-tantangan luarnya secara mandiri. Beberapa pengamat mengatakan bahwa Jepang harus dipaksa belajar menanggung keamanannya secara mandiri setelah sekian lama menikmati keuntu

hukum dan sistem politiknya.

Di balik upaya-upaya perubahan konstitusi, hukum dan sistem politiknya itu terdapat kekhawatiran mengenai hasil akhir (*out corner* dari langkah-langkah itu. Berdasarkan pengalaman, Jepang telah berhasil mengadakan penyesuaian-penyesuaian terhadap perkembangan baru (Restorasi Meiji dan Rekonstruksi Ekonomi pasca PD II). Dari pengamatan terhadap upaya perubahan itu menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan untuk mengadakan perubahan kebijaksanaan yang menjunjung tinggi kaidah "multikonsensus", meskipun berjalan sangat lambat tetapi tidak dapat diingkari seketika dihasilkan kata sepakat ala Jepang maka suatu prakarsa untuk mandiri dapat diterjemahkan